

## ISTIKAMAH PERJUANGKAN BANGSA DAN NEGARA

# NU Tak Pernah Minta dan Merebut Jabatan

**JAKARTA (KR)** - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyatakan, NU tidak pernah meminta ataupun merebut jabatan.

Dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (11/8), Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf memastikan PBNU selalu istikamah memperjuangkan kepentingan agama, bangsa dan dunia yang bukan sekadar kepentingan organisasi maupun kepentingan perorangan.

"NU dari dulu tidak pernah minta. Dari dulu kiai kita tidak pernah menyodor-nyodorkan untuk merebut jabatan," kata Gus Yahya saat membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Kesehatan NU di Semarang.

Sejak awal kemerdekaan, kata Gus Yahya, NU tidak pernah mementingkan golongan dan keluarga. Ia me-

ngatakan NU selalu mementingkan bangsa dan negara, seperti di detik-detik kemerdekaan.

"Dulu, menjelang kemerdekaan RI, di tengah intensnya pergulatan persiapan kemerdekaan dengan PPKI dan BPUPKI, di situ KH Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) putra Hadratusyech KH Hasyim Asyari menjadi salah seorang tokoh utama panitia sembilan," ucapnya.

Gus Yahya menceritakan, ketika itu terdapat seorang perwira Jepang bernama Naobuhoro Ono yang merupakan seorang Muslim. "Ia bertanya kepada Hadratusyech, Kiai kalau nanti Indonesia sudah merdeka be-

tul, siapa menurut Kiai yang pantas memimpin negara yang baru lahir ini?," cerita Gus Yahya.

"Kiai Hasyim dengan tanpa ragu-ragu menjawab Insinyur Soekarno. Padahal, putranya sendiri ini (KH Wahid Hasyim) tokoh utama. Kenapa *ndak* disebut? Ya, kalau bisa Wahid Hasyim. Beliau dengan tanpa ragu menyebut Insinyur Soekarno," sambungnya.

Ketegasan Hadratusyech itu, menurut Gus Yahya, adalah murni karena ia melihat yang terbaik untuk memimpin Indonesia pada waktu itu adalah Soekarno (Bung Karno). "Oleh karena itu, NU harus selalu berpikir tentang apa yang terbaik buat bangsa dan negara ini, bukan untuk NU sendiri. Kita tidak peduli dari mana asalnya, yang penting yang terbaik untuk bangsa dan negara," tutur Gus Yahya. (Ant)-f

## JOKOWI TEKEN PERPRES

# Mahfud - Muhadjir Pimpin Gugus Tugas TPPO

**JAKARTA (KR)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menkopolkum Mahfud MD sebagai Ketua I dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Ketua II dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang salinannya diunggah di [jdih.setneg.go.id](http://jdih.setneg.go.id) dan dipantau di Jakarta, Jumat (11/8).

Dalam Perpres terbaru mengenai pejabat struktur di Gugus Tugas TPPO itu, Presiden Jokowi juga menetapkan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat adalah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sementara, Anggota Gugus Tugas Pusat adalah jajaran menteri dan kepala lembaga negara, di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan lainnya.

Kemudian, Presiden Jokowi juga membentuk Sekretariat Gugus Tugas yang berada di lingkungan Polri dan ditetapkan oleh Kapolri. Sekretariat akan dipimpin oleh Kepala Sekretariat. "Kepala Sekretariat

yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia," tulis Perpres No 49/2023.

Perpres tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 10 Agustus 2023, dan diundangkan pada tanggal yang sama. Perpres 49/2023 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Adapun perubahan pertama atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 adalah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 yang diteken pada 1 April 2023. (Ant/Has)-d

## PENINJAUAN KEMBALI DITOLAK MA

# Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu

**JAKARTA (KR)** - Mahkamah Agung (MA) memutuskan sengketa proses pemilihan umum yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP Prima) tentang partai politik peserta Pemilu 2024. MA resmi menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan DPP Prima terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

"Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur tidak diterima," demikian bunyi amar putusan MA, Jumat (11/8).

Dalam kasus ini, KPU RI menjadi pihak yang digugat. Perkara diputus oleh Ketua Majelis Hakim Irfan Fachrudin, Anggota Majelis 1 Yodi Martono Wahyunadi dan Anggota

Majelis 2 Cerah Bangun. Permohonan PK tersebut berkaitan dengan sengketa proses pemilihan umum yang diajukan oleh DPP Prima ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022.

Bahwa atas penetapan KPU RI tersebut, DPP Prima mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi

Nomor: 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT yang mana perkara tersebut sudah diputus pada tanggal 19 Januari 2023.

Dalam Putusan PK tersebut, MA berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa proses pemilihan umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau PK, sesuai ketentuan Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali a quo dinyatakan tidak diterima," tulis keterangan resmi MA. (Ant/Has)-d

## PRESIDEN SOAL MOBILISASI KOMCAD

# Hanya untuk Kepentingan Pertahanan Negara

**BANDUNG (KR)** - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Komponen Cadangan (Komcad) TNI yang dalam tiga tahun sudah ada 18 batalion dengan jumlah 8.574 orang, dimobilisasi hanya untuk kepentingan pertahanan negara. Karena, tentara dan rakyat harus manunggal dalam konsep kesemestaan untuk bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman.

"Konsep kesemestaan perlu diterapkan secara nyata, dengan meningkatkan peran dan partisipasi setiap warga negara sebagai komponen cadangan, sebagai bagian dari sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu, hanya untuk kepentingan pertahanan negara," kata Presiden Jokowi dalam amanat tertulis yang dibacakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di hadapan Komcad TA 2023 di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (11/8).

Komponen Cadangan yang dimiliki Indonesia, kata Presiden, sekarang ada pada tiga matra, untuk melaksanakan strategi pertahanan ber lapis, memperbesar dan memperkuat kapasitas komponen utama (TNI), yang dapat dikerahkan dan dimobilisasi apabila negara dalam keadaan darurat militer, atau keadaan perang,

yang ditimbulkan oleh ancaman seperti invasi dari negara lain.

Kehadiran Komcad TNI, kata Presiden, sebagai langkah terus memperkuat daya tangkal masyarakat dan bangsa, untuk mewaspadai setiap potensi ancaman, dan menyiapkan antisipasi sedini mungkin dan terus membangkitkan kesadaran bela negara. Selain itu, dalam upaya untuk terus mengembangkan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, selain menyiapkan sumber daya manusia unggul dengan karakter tangguh dan patriotik dalam prajurit TNI serta memodernisasi alutsista pada matra darat, laut dan udara.

"Namun, pertahanan negara tidak cukup hanya ditangani kekuatan militer, tapi juga merupakan tugas dan kewajiban seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga adalah kewajiban kita semua untuk selalu membela bangsa dan negara. Karenanya rakyat, Pemerintah, dan seluruh elemen negara harus bersinergi membangun simpul yang kuat untuk mengelola sumber daya pertahanan bangsa yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia terutama anggota komponen cadangan," kata Presiden.

Dalam tiga tahun, anggota Komcad TNI tercatat sebanyak 8.574 orang, dimana pada Gelombang I-2021 berjumlah 3.103 orang, Gelombang II-2022 berjumlah 2.974 orang dan di Gelombang III-2023 sebanyak 2.497 orang. Dari 2.497 orang di 2023, terdiri dari Komcad Matra Laut 500 orang (450 pria dan 50 wanita), Matra Udara 500 orang pria, dan Matra Darat 1.497 orang. (Ant/San)-d



KR-Antara/Novrian Arbi

Personel Komponen Cadangan melakukan atraksi keterampilan usai upacara Penutupan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2023 di Lapangan Penadiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (11/8/2023).

## DIGELAR PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

# Peringatan Proklamasi dan Piagam Kedudukan

**YOGYA (KR)** - Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menggelar Sinau Sejarah Keistimewaan DIY 'Proklamasi Kemerdekaan RI dan Piagam Kedudukan'. Acara bertema 'Makna Penting Yogyakarta bagi NKRI' akan diadakan Selasa (15/8), pukul 10.00-13.00 di SMA Negeri 1 Wonosari, dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Seperti diketahui, Piagam Kedudukan mempunyai makna penting dalam sejarah keistimewaan DIY. Menurut Sejarahawan UGM, Julianto Ibrahim MHum, Piagam Kedudukan adalah piagam dari Presiden Sukarno yang ditujukan kepada Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang telah mencurahkan segala pikiran, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. "Piagam ini telah dibuat oleh Presiden Sukarno pada 19 Agustus 1945 dan baru diberikan pada 6 September 1945 setelah ada amanat Sultan HB IX dan Paku Alam VIII," jelasnya.

Piagam kedudukan ini, lanjut Julianto, mempunyai tiga makna penting yaitu pengakuan, penghargaan, dan perjanjian. Pertama, Piagam Kedudukan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Sukarno, bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan daerah istimewa dengan pemerintahan sendiri.

"Piagam Kedudukan ini merupakan pengakuan pertama secara resmi pemerintah

Indonesia atas keistimewaan daerah Yogyakarta yang keberadaannya sudah ada sejak sebelum Indonesia lahir," kata Julianto.



KR-Wawan Isnawan Julianto Ibrahim MHum

Kedua, Piagam Kedudukan ini juga merupakan bentuk penghargaan atau apresiasi Presiden Sukarno, karena Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman telah menyatakan bergabung dan mendukung negara Republik Indonesia.

Ketiga, Piagam Kedudukan ini merupakan wujud perjanjian antara Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia untuk memperjuangkan eksistensi negara Republik Indonesia, sehingga Republik Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh.

Ada dua peristiwa penting yang mendasari Sukarno memberikan Piagam Kedudukan, pertama, pada 19 Agustus 1945 Sultan HB IX mengirimkan telegram ke Jakarta yang berisi ucapan selamat kepada Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang

terpilih pada sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.

Kedua, pada 5 September 1945 Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Pakualaman merupakan daerah istimewa yang bergabung dan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia.

Atas dukungan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII tersebut, Presiden Sukarno memberikan apresiasi dan rasa terima kasih dengan mengeluarkan Piagam Kedudukan yang diberikan langsung ke Yogya oleh Mr Maramis dan Mr Sartono pada 6 September 1945. "Walaupun diberikan pada 6 September 1945, Piagam Kedudukan tersebut diberi tanggal 19 Agustus 1945," jelasnya.

Dalam Sinau Sejarah Keistimewaan DIY 'Proklamasi Kemerdekaan RI dan Piagam Kedudukan' ini akan digelar Dialog Keistimewaan 'Makna Penting Yogya bagi NKRI' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Julianto Ibrahim MHum (Sejarahawan UGM), Widihasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY), Muhammad Taufiq Salyono SPd MPd Si (Kepala SMA Negeri 1 Wonosari) dengan moderator Febri Setiawan.

Selain itu ada pula Pemutaran Video Dokumenter 'Piagam Kedudukan' dan acara hiburan berupa musik dan tari oleh siswa SMA Negeri 1 Wonosari. Acara yang dipandu MC Gundhissos ini juga akan dimirahkan bintang tamu grup musik The Biskoit. (Wan)

## BRI LIGA 1 2023/2024

# Bali United Geser MU di Puncak Klasemen

**GIANJAR (KR)** - Bali United menggeser Madura United dari puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2023/2024 berkat tiga poin yang mereka dapatkan di laga pembuka pekan kedelapan, Jumat (11/8). Menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali, Bali United menang dramatis dengan skor 3-2.

Dengan tambahan tiga poin ini, Bali United naik ke puncak klasemen dengan koleksi 14 poin. Madura United turun ke posisi dua dengan koleksi 13 poin. Pertandingan, Sabtu (12/8) hari ini, tersaji duel Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang dan Persik Kediri melawan Persis Solo.

Duel Bali United melawan PSM berlangsung menarik. PSM sejatinya mendominasi di awal pertandingan. Juku Eja mampu unggul lebih dahulu melalui sepakan Rizky Eka. Namun, keunggulan Juku Eja tidak berlangsung lama.

Bali United sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tujuh menit kemudi-

an lewat gol yang disarangkan Privat Mbarga. Persaingan sengit terjadi setelah itu. Tim tamu bekerja keras untuk menahan serangan tuan rumah. PSM harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-30. Safrudin Tahar mendapatkan kartu merah dari wasit setelah pelanggaran kerasnya pada pemain Bali United.

Dalam posisi ini, PSM tak menyerah. Bahkan Yance Sayuri membawa PSM unggul 2-1 menit 40 melalui eksekusi apik tendangan bebas. Unggul dalam jumlah pemain, Bali United lebih mengigit di babak kedua. Ilija Spasojevic menjadi pahlawan bagi tuan rumah.

Setelah sejumlah upaya dilakukan Bali United untuk menyamakan skor gagal, gol penyama akhirnya tercipta. Menit 74, Spasojevic menyamakan skor menjadi 2-2 lewat sundulan apik memanfaatkan sepak pojok. Spaso pun mencetak gol keduanya pada menit 85 kembali lewat sundulan untuk membawa Bali United menang 3-2. (Yud)-d

## TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOBA

# Eks Kapolres Bukittinggi Dipecat

**JAKARTA (KR)** - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH) kepada mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara. Pemecatan itu terkait kasus pelanggaran etik berat terlibat dalam tindak pidana narkoba.

"Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH sebagai anggota Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Jakarta, Jumat (11/8).

Sanksi administratif tersebut dibacakan dalam putusan Sidang KKEP yang digelar Kamis (10/8) di ruang sidang Divisi Propam Polri lantai 1 Gedung TNCC. Sidang

KKEP dipimpin Ketua Komisi Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Wakil Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto, Anggota Komisi I Kombes Pol Satus Ginting, Anggota Komisi II Kombes Pol Hengki Wijaya dan Anggota Komisi III Kombes Pol Rudi Mulyanto.

Sidang tersebut menghadirkan lima orang saksi, tiga di antaranya hadir secara virtual dan dua lainnya hadir langsung di persidangan. "Kelima saksi tersebut, yaitu Kopol K, saudara SM, saudara LP, Kopol SHS dan AKP AA," ucap Ramadhan.

Selain dijatuhi sanksi dipecat sebagai anggota Polri, Majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi etika karena perbuatan Dody Prawiranegara sebagai perbuatan tercela. (Ant)-f

## SAMPAI AKHIR OKTOBER

# Langit Jawa Bersih Tanpa Awan

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau kering dalam jangka waktu lama telah menyebabkan langit Pulau Jawa bersih tanpa awan sampai akhir Oktober 2023.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PP-KL) KLHK Sigit Reliantoro mengatakan, kondisi itu membuat Pemerintah tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan dan meluruhkan polusi udara di Pulau Jawa. "Sampai akhir Oktober tidak tersedia awan untuk operasi teknologi modifikasi cuaca," ujarnya di Jakarta, Jumat (11/8).

Sigit menuturkan, mitigasi pengendali-

an pencemaran udara jangka pendek bisa dilakukan melalui teknologi modifikasi cuaca, namun syarat utama harus ada potensi awan yang bisa diturunkan melalui penaburan garam di lapisan atmosfer. "Bila langit kering tanpa awan, maka operasi itu tidak bisa dilakukan. Di Jawa, terutama Jakarta ketersediaan awan tidak ada," katanya.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ardhasona Sopaheluwakan mengatakan, El Nino tidak memperparah polusi udara dan hanya memberikan dampak nyata terhadap kemarau panjang, terkhusus Jakarta. Meski langit tak ada awan, namun hujan di beberapa lokasi kemungkinan bisa terjadi. (Ant)-d